

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan Dunia menuju Revolusi Industri 4.0 telah menimbulkan perubahan yang dinamis terhadap pasar tenaga kerja. Karakteristik yang ada di Revolusi Industri ini ditandai dengan pergeseran tenaga manusia menjadi tenaga siber dan banyaknya otomatisasi yang menimbulkan keterampilan yang diperlukan di dunia kerja semakin dinamis, apabila suatu tenaga kerja tidak mampu mengikutinya akan membuat adanya kesenjangan keterampilan di dunia kerja (Cahyaningtyas et al., 2023), hal ini tentunya bila tidak ditangani secara tepat akan mengakibatkan pengangguran yang cukup masif.

Pengangguran adalah salah satu permasalahan global yang pasti dialami berbagai negara baik itu negara berkembang maupun negara maju sekalipun, pengangguran biasanya terjadi apabila jumlah penduduk tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga membuat suatu penduduk dalam suatu negara tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan (Marlina et al., 2024). Menurut data statistik Worldometers yang menyajikan negara – negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2025, dalam data tersebut Indonesia menempati peringkat ke empat dalam penduduk terbanyak se-dunia, dengan Jumlah penduduk sebanyak 285.721.236 Juta Jiwa penduduk.

Jumlah penduduk tersebut dapat mengindikasikan tingkat kepadatan penduduk tinggi yang memiliki pengaruh pada kualitas layanan publik, pendidikan,

infrastruktur, dan kesempatan dalam bekerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang rata.

Dengan jumlah penduduk yang dimiliki Indonesia saat ini tentu memiliki persoalan yang timbul akibat banyaknya jumlah penduduk tersebut, yakni pengangguran. Penduduk Indonesia terus bertambah akan tetapi ketersediaan lapangan pekerjaan tidak dapat mengimbangi jumlah penduduknya (Sari et al., 2016). Ketidakseimbangan tersebut menjadi tantangan kepada pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan yang mana memerlukan kebijakan tepat agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang disajikan Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2025, jumlah penduduk usia pekerja sebanyak 216,79 Juta jiwa, 153,05 Juta jiwa diantaranya merupakan angkatan kerja. Di lain sisi data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia sebesar 4,76% (BPS 2025). Tingkat Persentase di atas mengindikasikan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia masih cukup tinggi, maka dengan hal tersebut pemerintah perlu melakukan upaya untuk menurunkan angka tersebut. Berdasarkan Buku Ketenagakerjaan Dalam Data Edisi 1 Tahun 2024, penduduk yang berusia 15 tahun ke-atas dapat dikatakan sebagai penduduk usia kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah ukuran yang menggambarkan persentase dari jumlah pengangguran yang ada di angkatan kerja. Menurut Karya ilmiah Kementerian Ketenagakerjaan yakni buku berjudul “Ketenagakerjaan Dalam Data 2021 Edisi 4”. Pengangguran Terbuka merupakan individu yang

berusia 15 tahun keatas yang termasuk aktif dalam mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha, sementara belum bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan, individu yang belum mendapatkan pekerjaan ataupun individu yang sudah memperoleh pekerjaan akan tetapi belum memulai pekerjaan tersebut.

Persoalan Ketenagakerjaan serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cukup tinggi pada tingkat nasional juga tercermin pada tingkat regional. Di Pulau Jawa, yakni Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, sehingga membuat dinamika angka pasar tenaga kerjanya dapat mempengaruhi angka pengangguran terbuka nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020 – 2024, Dinamika ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Dinamika ini disebabkan adanya dampak Pandemi Covid-19 yang memicu perlambatan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 melonjak hingga 5,84%. Seiring dengan upaya pemulihan ekonomi nasional, angka tersebut mulai menunjukkan tren penurunan secara bertahap, yakni sebesar 5,74% pada tahun 2021, pada tahun 2022 bertahap turun menjadi 5,49%, dan melandai ke angka 4,88% pada tahun 2023, hingga mencapai titik terendah sebesar 4,19% pada Agustus 2024. Meskipun secara statistik angka pengangguran terus menyusut, penurunan tersebut belum sepenuhnya menjamin kualitas penyerapan tenaga kerja yang optimal di tingkat daerah, angka tersebut menjadi tantangan pemerintahan Jawa Timur, mengingat di tiap Kota atau Kabupaten nya memiliki TPT yang cukup tinggi.

**Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota atau Kabupaten, Provinsi Jawa Timur**

Tingkat Pengangguran Terbuka 10 Besar Kota / Kabupaten Provinsi Jawa Timur					
Tahun 2023			Tahun 2024		
No	Kota/Kabupaten	Persentase	No	Kota/Kabupaten	Persentase
1	Kab Sidoarjo	8.05%	1	Kab Sidoarjo	6.49%
2	Kab Gresik	6.82%	2	Kab Gresik	6.45%
3	Kota Malang	6.80%	3	Kota Malang	6.10%
4	Kota Surabaya	6.76%	4	Kab Bangkalan	5.35%
5	Kab Bangkalan	6.18%	5	Kab Malang	5.13%
6	Kota Madiun	5.85%	6	Kota Blitar	5.11%
7	Kab Kediri	5.79%	7	Kab Kediri	5.10%
8	Kab Malang	5.70%	8	Kab Pasuruan	5.02%
9	Kab Tulungagung	5.65%	9	Kota Surabaya	4.91%
10	Kota Pasuruan	5.64%	10	Kota Pasuruan	4.63%

Sumber: BPS Jawa Timur, Data diolah oleh Peneliti, 2023 dan 2024 (Jawa Timur, 2024).

Dari tabel di atas yang bersumber dari Badan Pusat Statistik tahun 2023 hingga 2024 yang menunjukkan peringkat sepuluh besar dari 38 Kota atau Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur, dengan Kabupaten Sidoarjo yang selalu menempati peringkat satu sebagai kota atau kabupaten dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi. Di lain sisi Kota Surabaya menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Timur juga termasuk ke dalam sepuluh besar kota atau kabupaten Provinsi Jawa Timur dengan peringkat empat besar pada tahun 2023 tercatat 6,76% dan menjadi peringkat sembilan besar dengan 4,91% pada tahun 2024. Hal tersebut merupakan hal positif bagi Kota Surabaya dengan angkatan kerja sebanyak 1.569.714 Jiwa pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 1.624.822 Jiwa berdasarkan data Keadaan Ketenagakerjaan Kota Surabaya Tahun 2024. Akan tetapi, Kota Surabaya masih termasuk kota yang ada di sepuluh peringkat besar dalam Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur, walau berdasarkan tabel sebelumnya

menunjukkan tingkat pengangguran terbuka Kota Surabaya dari 6,76% pada tahun 2023 turun menjadi 4,91% pada tahun 2024, Meski terjadi penurunan, jumlah pengangguran masih cukup banyak dimana Kota Surabaya seharusnya menjadi contoh bagi kota atau kabupaten lain yang ada di Provinsi Jawa Timur akan tetapi Kota Surabaya masuk dalam kota atau kabupaten yang memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka yang cukup tinggi, tentunya Kota Surabaya sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur memiliki peran vital dalam penyerapan tenaga kerja.

Jumlah penduduk Kota Surabaya mencapai 3,02 Juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya Tahun 2024, Angka tersebut menunjukkan bahwa Kota Surabaya menjadi kota terbesar kedua setelah Jakarta serta memiliki jumlah pengangguran 106.120 jiwa di tahun 2023 dan turun menjadi 79.767 jiwa pada tahun 2024 (Keadaan Ketenagakerjaan Kota Surabaya, 2024). Angka tersebut masih cukup tinggi walau sempat berkurang untuk ukuran Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua tentunya memiliki persoalan ketenagakerjaan yang kompleks dengan kualifikasi yang cukup banyak serta ditambahkan persoalan perbandingan *demand* dan *supply* kemampuan pekerjaan yang diperlukan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan ataupun dunia kerja (Adriyanto et al., 2020). Hal ini memicu munculnya ketidakefektifan penyerapan tenaga kerja di lapangan pekerjaan yang ada. sehingga calon pekerja cukup kesulitan dalam mencari kerja yang membuat Kota Surabaya memiliki angka pengangguran yang cukup besar di Provinsi Jawa Timur, yang juga berakibat pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat

menimbulkan kemiskinan, kriminalitas dan juga menghambat pembangunan suatu daerah.

**Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya 2020 - 2025**

Tingkat Penangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya	
Tahun	TPT (%)
2020	9,79
2021	9,68
2022	7,62
2023	6,76
2024	4,91
2025	4,84

Sumber: BPS Kota Surabaya 2020-2025 (Surabaya,2025)

Persoalan yang ada di Kota Surabaya dengan tingkat pengangguran terbuka yang memiliki rentang 6 tahun mencapai puncaknya pada tahun 2020 sebesar 9,79% atau setara dengan 154.200 jiwa penduduk usia produktif yang berstatus menganggur dengan kondisi Pandemi Covid-19 dan berlanjut pada tiap tahunnya dengan masa pemulihan hingga turun pada 2024 sebesar 4,91% atau setara dengan 79.900 jiwa, serta pada tahun 2025 kembali menunjukkan tren penurunan menjadi 4,84% berdasarkan tabel di atas, meskipun terjadi penurunan, angka yang terlihat masih terbilang cukup besar dengan puluhan ribu jiwa yang menunjukkan perlunya solusi dari Pemerintah Kota Surabaya. Maka Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan upaya dalam menurunkan angka pengangguran terbuka yang ada dengan membuat program yang berfokus pada meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini instansi yang tepat dalam mengatasi pengangguran yakni Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya. Dengan berfokus pada pengembangan industri daerah dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat melalui pemberdayaan sumber daya manusia, penciptaan hubungan industrial yang harmonis, dan perluasan kesempatan kerja.

Untuk mengatasi persoalan tersebut Disperinaker membuat suatu program pelatihan kerja bersertifikat dengan pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021 – 2026, dalam RPJMD tersebut, Disperinaker Kota Surabaya melakukan peningkatan kompetensi tenaga kerja untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka pengangguran (Disperinaker, 2024). Dan juga didukung dengan dasar hukum Undang – undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Undang – undang ini menjamin hak setiap tenaga kerja untuk memperoleh, mengembangkan, dan meningkatkan kompetensi kerja. Tidak hanya itu Undang – undang ini mendukung untuk membekali tenaga kerja dengan keahlian yang relevan supaya dapat meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan kesejahteraannya. Sehingga program pelatihan bersertifikat ini menjadi bentuk pelaksanaan amanat negara dalam menjadi hak tenaga kerja untuk berkembang. Landasan hukum terbentuknya program tersebut didukung juga oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 8 Tahun 2014 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi. Peraturan ini menjadi pedoman agar pelatihan kerja menjadi pelatihan teoritis dan praktis yang terukur sesuai dengan standar industri.

Pemerintah Kota Surabaya melalui Disperinaker mewujudkan Program pelatihan kerja berdasar peraturan – peraturan tersebut, dengan pengimplementasian dan sosialisasi program digencarkan pada tahun 2022,

pelatihan ini berfokus pada pemberian keterampilan praktis. Hal ini disampaikan oleh Kepala Disperinaker Kota Surabaya dalam berita online [www.suarasurabaya.net](http://www.suarasurabaya.net) :

“Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DISPERINAKER) Kota Surabaya Achmad Zaini mengatakan bahwa pelatihan gratis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya memiliki tujuan untuk mencetak tenaga kerja profesional. Menurutnya, pelatihan kerja tersebut secara spesifik telah disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang diminta oleh berbagai perusahaan yang ada di Surabaya. Zaini menjelaskan, ada beberapa jenis pekerjaan yang diprioritaskan dalam pelatihan kerja ini, yakni pelatihan alat angkut (forklift), desain grafis, fotografi, *pastry cook*, perawatan rambut serta perhotelan.

Setelah menyelesaikan rangkaian pelatihan, para peserta akan mendapatkan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Selanjutnya, peserta akan disalurkan kepada berbagai perusahaan yang telah mengajukan permintaan tenaga kerja. Walaupun tidak ada jaminan diterima, Zaini mempertegas bahwa pelatihan ini dapat meningkatkan persentase penerimaan lebih besar dikarenakan peserta sudah dilatih dan disalurkan langsung oleh Disperinaker. Oleh karena itu Achmad Zaini mengajak warga Kota Surabaya, khususnya anak muda yang belum bekerja, untuk mendaftar pelatihan ini dengan tujuan membantu mempermudah jalan mereka mendapatkan pekerjaan.”

([https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/pemkot-surabaya-buka-pelatihan-kerja-bersertifikat-nasional-gratis-daftar-di-sini/#google\\_vignette](https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/pemkot-surabaya-buka-pelatihan-kerja-bersertifikat-nasional-gratis-daftar-di-sini/#google_vignette), diakses pada 22 Oktober 2025).

Program Pelatihan Kerja Bersertifikat ini ditujukan khusus untuk warga Kota Surabaya yang berada pada usia aktif kerja dengan tujuan mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, dan meningkatkan daya saing tenaga kerja formal maupun informal. Program ini memiliki persyaratan seperti masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Surabaya dan masyarakat yang menginjak usia 18 sampai 35 tahun. Dengan syarat rentang usia peserta pelatihan memiliki usia minimal 18 tahun dikarenakan merefleksikan sebagai usia legal yang didasari oleh Undang – Undang ketenagakerjaan, yang dimana peserta pelatihan dianggap telah dewasa di bawah payung hukum dan juga

telah menamatkan Pendidikan dasar, hal tersebut membuat peserta bisa mempelejadi keahlian dasar dan dianggap siap terjun ke dunia kerja. Sementara itu, maksimal usia 35 tahun ditetapkan ditujukan pada pekerja yang ingin berganti karir ataupun yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan memanfaatkan Pelatihan Kerja Bertifikat ini sebagai sarana *up-skilling* atau *re-skilling* untuk menguatkan kelompok calon pekerja dengan usia tersebut agar dapat mendaftar kerja di perusahaan dan bisa bersaing dengan *freshgraduate*, rentang usia pendaftaran tersebut bertujuan untuk memastikan peserta segera terserap pasar kerja dan memberikan dampak ekonomi dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi peserta pelatihan kerja bersertifikat.



**Gambar 1.1 Pendaftaran Pelatihan Bersertifikat Kota Surabaya**

Sumber: Instagram Resmi @Disperinakersby (2025)

Pelatihan Kerja Bersertifikat yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya ini memiliki berbagai jenis bidang pelatihan kerja

yakni Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pelatihan Desain grafis, *IT Support*, Teknisi Komputer, Multimedia, *Digital Marketing*), Bidang Teknik dan Industri (Pelatihan otomotif mobil, otomotif motor, Las FCAW, Las SMAW, Operator Forklift, *Mobile Crane*, Teknisi Perawatan Mesin Pendingin), Bidang Pariwisata dan Tataboga (Pelatihan Perhotelan, *Pastry Cook*, *Cleaning Service*, Jasa Boga, Perawatan Wajah, *Make up Artist*, Barista), dan Bidang Jasa, Perkantoran dan Bisnis (Pelatihan Ekspor – Impor, K3 Umum, Gada Pratama, Administrasi Perkantoran, Akuntansi Dasar). Terdapat 4 bidang pelatihan dan 22 jenis pelatihan yang dapat dipilih oleh calon peserta untuk mengembangkan kemampuan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Pelatihan yang dihadirkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya guna menekan angka pengangguran dengan pelatihan kerja sesuai pilihan peserta dan adanya ujian sertifikasi setelah akhir pelatihan, hal tersebut membuat peserta pelatihan memiliki kesempatan kerja yang besar untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan peserta, meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan juga memperkecil angka pengangguran yang ada di Kota Surabaya.

Upaya Pemerintah Kota Surabaya melalui Disperinaker dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang dalam rentang tahun 2020 hingga tahun 2025 berkisar diantara 9,79% hingga turun ke 4,84%, telah menunjukkan capaian yang positif. Data internal Disperinaker mencatat bahwa ratusan peserta pelatihan telah berhasil diserap menjadi tenaga kerja pada tiap tahunnya. Program ini menjadi salah satu sarana pengembangan kompetensi untuk menjembatani kesenjangan keahlian (*skills gap*) pencari kerja. Melalui penyelarasan kualitas SDM

dengan kebutuhan industri, program ini diharapkan mampu memperluas peluang kerja, yang pada akhirnya berkontribusi langsung terhadap penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Surabaya secara berkelanjutan. Akan tetapi, data keberhasilan penyerapan tenaga kerja ini perlu dianalisis secara mendalam selama lima tahun terakhir, dikarenakan adanya faktor Pandemi Covid-19 di tahun 2021 dan masa pemulihan ekonomi, untuk melihat efektivitas program ini dan sejauh mana dampak program pelatihan ini terhadap penurunan TPT Kota Surabaya. Adapun beberapa penelitian tentang pelatihan kerja, dengan temuan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian – penelitian sebelumnya. Penelitian Hanzen & Dewi, (2024) yang dilakukan di BLK Provinsi Jawa Timur (Surabaya) lebih menyoroti masalah persiapan awal, seperti syarat kesesuaian jurusan sekolah peserta yang harus sesuai dan permasalahan Dinas terkait jadwal sosialisasi yang kurang rapi. Di sisi lain, penelitian Mukhlis et al., (2025) yang juga memakai teori efektivitas yang kemukakan oleh Duncan, dengan keterbatasan fokusnya pada masalah teknis di dalam lembaga pelatihan saja, seperti kurangnya instruktur atau alat yang belum lengkap. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut yang fokus menilai masalah internal lembaga (seperti jadwal dan fasilitas), penelitian ini menganalisis dari sudut pandang yang berbeda. Penelitian ini fokus menilai hasil akhirnya (*outcome*): apakah lulusan pelatihan benar-benar terserap di dunia kerja?

Melalui kerja sama antara Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta, penelitian ini tidak lagi mempermasalahkan soal pendaftaran atau jumlah instruktur. Justru, penelitian ini melihat apakah program pelatihan kerja bersertifikat ini mampu beradaptasi dengan

kebutuhan pasar kerja dan membantu lulusan peserta pelatihan agar dapat terserap di industri. sesuatu yang luput dari pembahasan penelitian-penelitian sebelumnya.

Pelatihan Kerja Bersertifikat mempunyai peranan penting dalam membantu masyarakat dalam menurunkan angka pengangguran terutama di Kota Surabaya. Sebagai salah satu Kota terbesar di Indonesia dan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya memerlukan layanan Pelatihan Kerja Bersertifikat yang dapat meningkatkan kompetensi pada bidang yang diminati pasar kerja, seperti teknologi digital, sektor perhotelan, dan lain – lain. Pelatihan ini menjadi sebagai sarana untuk mengembangkan kompetensi dan mendorong penyerapan tenaga kerja di bidang pekerjaan formal maupun informal. Oleh karena itu Penulis memutuskan untuk mengambil penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS PROGRAM PELATIHAN KERJA BERSERTIFIKAT DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa efektif program tersebut dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja guna mengurangi angka pengangguran Kota Surabaya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan rumusan masalah yaitu “Bagaimana efektivitas dari Program Pelatihan Kerja Bersertifikat dalam mengurangi pengangguran di Kota Surabaya?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dijabarkan di atas, Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas dari Program Pelatihan Kerja dalam mendukung pengurangan pengangguran di Kota Surabaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Penulis**

- a) Menambah ilmu pengetahuan terkait efektivitas Program Pelatihan Kerja Bersertifikat yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya dalam mengurangi pengangguran.
- b) Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

### **2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

Penelitian ini sebagai bahan literatur dan referensi untuk akademisi yang mempunyai lingkup penelitian yang sejenis khususnya bagi mahasiswa Program Administrasi Publik, di Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

### **3. Bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya**

Penelitian ini sebagai saran, manfaat, serta sebagai evaluasi dari program pelatihan kerja bersertifikat yang dapat memberikan dampak positif bagi Pemerintah dan masyarakat Kota Surabaya.